

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA

Trivena Lumenta¹, Merry C.N. Rumagit², Viviane Manoppo³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: 18305033@unima.ac.id, merryrumagit@unima.ac.id, vivianemanoppo@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memahami hubungan antar variabel. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, yang berarti dapat dihitung secara numerik dan disajikan dalam bentuk angka sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat upah dapat memberikan dampak ganda: mendorong pencari kerja untuk masuk ke pasar kerja, tetapi juga dapat menahan niat pelaku usaha dalam menambah tenaga kerja karena pertimbangan biaya. Selain itu, indikator pembangunan manusia belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Wilayah dengan indeks pembangunan rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yang diduga berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kata kunci: Upah, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the poverty rate in Minahasa Regency. The approach used is a quantitative approach, where the data collected is analyzed using statistical methods to understand the relationship between variables. The data used is quantitative, which means it can be calculated numerically and presented in the form of numbers as a basis for drawing conclusions. The results of the study indicate that low wage rates can have a dual impact: encouraging job seekers to enter the labor market, but can also hold back business actors' intentions to increase their workforce due to cost considerations. In addition, human development indicators have not shown a significant effect on poverty. Areas with a low development index tend to have high poverty rates, which are thought to be related to the lack of abilities and skills needed in the world of work.

Keywords: Wages, Human Development Index

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2018, populasi Indonesia mencapai sekitar 265 juta jiwa. Besarnya populasi ini menjadi latar munculnya berbagai persoalan, salah satunya adalah kemiskinan. Di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju, pengangguran menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Hal ini karena keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja, yang kemudian memicu menurunnya kontribusi sektor ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika jumlah angkatan kerja terus bertambah namun tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka risiko kemiskinan pun meningkat. Tingginya waktu yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan bisa menjadi indikasi dari tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah.

Berdasarkan data pengamatan dari tahun 2013 hingga 2015, tingkat pengangguran mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sedangkan pada periode 2017 sampai 2021, terjadi dinamika berupa fluktuasi atau naik-turunnya angka pengangguran. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia memperbesar kemungkinan masyarakat masuk dalam kategori miskin. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara berkembang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dalam hal penyediaan pekerjaan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan kemiskinan dari waktu ke waktu (Sukirno, 2016).

Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakstabilan upah dan efisiensi pengupahan juga turut memengaruhi tingkat kemiskinan (Khotimah, 2018). Dalam dunia ketenagakerjaan, fenomena kekakuan upah terjadi ketika upah tidak dapat secara fleksibel menyesuaikan diri dengan kondisi pasar tenaga kerja. Realitasnya, upah riil terkadang tetap tinggi di atas titik keseimbangan pasar, padahal kondisi tersebut tidak selalu bisa dipertahankan secara efektif (Mankiw, 2003).

Kenaikan upah pun tidak selalu memberikan keuntungan bagi pekerja, terutama jika perusahaan tidak mampu mengikuti ketentuan tersebut. Menurut prinsip pasar kerja, ketika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan, maka tekanan terhadap upah akan meningkat. Sebaliknya, jika pasokan pekerja terbatas, permintaan cenderung menurun, yang berdampak pada naik turunnya upah di pasar (Cahyani, 2016).

Hasil studi juga menunjukkan bahwa kemiskinan bisa dipengaruhi oleh aspek pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar peluang untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu daerah (Khotimah, 2018). Namun di sisi lain, terdapat temuan bahwa di Provinsi Lampung, penduduk dengan pendidikan tinggi justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan seiring dengan kenaikan upah minimum yang diberlakukan pemerintah, yang mencerminkan adanya kekakuan dalam sistem pengupahan (Sapitri, 2018).

Penelitian lain di Kabupaten Paser menemukan bahwa pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan penghasilan akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun dalam konteks ini, pendidikan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Wardiansyah et al., 2016; Pramudjasi et al., 2019).

Faktor penting lainnya yang turut memengaruhi kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan komponen dalam PDRB berkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi melambat, maka serapan tenaga kerja juga akan menurun. Sebaliknya, saat ekonomi berkembang dengan baik, maka lapangan kerja cenderung bertambah. Dalam penelitiannya, Dharmayanti (2011) menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB di suatu wilayah akan mendorong perkembangan ekonomi, meskipun tidak selalu disertai dengan perubahan struktur ekonomi secara signifikan. Hal ini kemudian akan membuka peluang kerja baru. Putri et al. (2019) menambahkan bahwa PDRB berdasarkan harga konstan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BPS menjadi salah satu ukuran dalam menilai sejauh mana pembangunan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. IPM menggambarkan kemampuan individu dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang untuk hidup lebih layak. Dalam kaitannya dengan teori modal manusia, pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan besar, termasuk peningkatan produktivitas, peluang kerja, dan penghasilan (Latifah, 2017).

Todaro dalam Dwi Mahroji (2019) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas pembangunan manusia yang tinggi akan membantu menekan angka kemiskinan di suatu daerah, terutama jika diukur melalui indikator seperti IPM.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul: "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Minahasa". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah : a) Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Minahasa? b) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Minahasa?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris berdasarkan uraian masalah di atas: a) Untuk mengkaji dampak Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Minahasa b) Untuk mengkaji bagaimana tingkat kemiskinan di Minahasa dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Manfaat bagi kepentingan ilmiah dan praktis diharapkan dari temuan penelitian ini. Temuan penelitian ini, secara teori, harus digunakan dan dikutip untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya tentang tingkat kemiskinan.

2. Tinjauan Pustaka

Tingkat Pengangguran

Istilah pengangguran digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang tidak sedang menjalankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, baik karena belum mendapatkan pekerjaan, sedang mencari kerja, ataupun karena memiliki pekerjaan namun belum bisa melaksanakannya. Menurut Pujoalwanto (2014), pengangguran mencakup individu yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, mereka yang aktif mencari pekerjaan, serta mereka yang hanya bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu. Bahkan, mereka yang berusaha mencari peluang kerja yang lebih baik pun masih termasuk dalam kategori ini. Artinya, pengangguran tidak selalu berarti tidak melakukan apa pun, tetapi juga menyangkut situasi di mana seseorang belum memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan harapannya.

Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pengangguran adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketika jumlah individu yang siap dan ingin bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang dapat menampung mereka, maka pengangguran pun tidak terhindarkan. Hal ini menjadi persoalan serius, karena setiap tahun, jumlah angkatan kerja—yakni mereka yang berusia produktif antara 15 hingga 64 tahun—terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan baru.

Latumaerissa (2015) menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya terbatas pada mereka yang aktif mencari pekerjaan, tetapi juga termasuk orang-orang yang sedang mencoba membangun usaha sendiri, maupun mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak memiliki peluang atau menyerah akibat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, individu yang secara administratif sudah dinyatakan memiliki pekerjaan, namun pekerjaannya belum dimulai, juga digolongkan ke dalam kelompok penganggur. Ini menunjukkan bahwa definisi pengangguran sangat luas dan mencakup berbagai situasi ketenagakerjaan yang tidak stabil atau belum berjalan efektif.

Kategori khusus dalam pengangguran dikenal sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang aktif mencari kerja, atau sedang mempersiapkan diri untuk memulai suatu usaha namun belum menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada tenaga kerja potensial yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, angka kemiskinan terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) merupakan rasio antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang telah bekerja. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan seberapa besar tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar melalui kegiatan kerja.

Seseorang dikatakan masuk dalam kategori pengangguran jika ia telah memasuki usia kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi syarat produktivitas dan penghasilan. Situasi ini sangat umum terjadi di negara-negara berkembang, di mana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja itu sendiri. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja menjadi penyebab utama sulitnya pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Banyak individu yang memiliki latar belakang pendidikan, namun keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan peluang kerja yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencari kerja.

Dengan demikian, persoalan pengangguran bukan hanya sekadar permasalahan tidak adanya pekerjaan, tetapi juga menyangkut berbagai aspek seperti ketersediaan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, serta efektivitas program pelatihan dan pendidikan yang ada. Upaya untuk menekan angka pengangguran harus mencakup kebijakan yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, dan pemberdayaan sektor informal sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat.

Upah Minimum

Pendapatan yang diterima oleh seseorang dari hasil kerjanya dalam suatu perusahaan atau lembaga dikenal dengan istilah gaji bersih. Gaji ini merupakan jumlah akhir yang diterima karyawan setelah dilakukan pemotongan atas kewajiban seperti pajak, iuran jaminan sosial, serta potongan-potongan lain yang berkaitan dengan aturan atau kesepakatan kerja. Gaji bersih tidak hanya mencerminkan imbalan atas hasil kerja, tetapi juga menunjukkan nilai riil yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Biasanya, jumlah ini diberikan secara periodik umumnya setiap bulan baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang atau fasilitas yang memiliki nilai ekonomis, sesuai dengan ketentuan dan standar biaya hidup yang berlaku di daerah tempat karyawan tersebut bekerja. Selain itu, istilah lain yang sangat erat kaitannya dengan gaji adalah upah, yaitu sejumlah kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Upah bisa diberikan berdasarkan satuan waktu (seperti harian atau bulanan), volume pekerjaan (seperti per unit), atau bentuk kontrak kerja tertentu yang disepakati bersama. Upah ini tidak selalu dalam bentuk uang saja, tetapi juga dapat berupa fasilitas tambahan, tunjangan untuk keluarga, atau bentuk kompensasi lainnya yang dianggap setara dengan nilai kerja yang diberikan oleh karyawan.

Secara hukum, definisi mengenai upah telah diatur dalam regulasi nasional. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau keluarganya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal pengupahan.

Fungsi dari upah atau gaji bukan hanya sekadar sebagai imbalan kerja, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi tenaga kerja dan keluarganya. Oleh karena itu, penetapan upah harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti biaya hidup layak, produktivitas, kelangsungan usaha, serta standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, perusahaan diwajibkan untuk memberikan gaji yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga adil dan mampu menjamin kesejahteraan pekerja. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pekerja.

Di sisi lain, keberadaan upah yang layak juga berkontribusi terhadap stabilitas tenaga kerja dalam perusahaan. Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil melalui sistem pengupahan yang transparan dan memadai cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi, loyal terhadap perusahaan, serta memiliki produktivitas yang lebih baik. Sebaliknya, gaji yang tidak sesuai dengan harapan atau standar kehidupan akan memicu ketidakpuasan, konflik industrial, bahkan meningkatkan potensi perpindahan kerja yang tinggi (*turnover*).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep gaji bersih dan upah sangat penting dalam mengelola hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Baik dari sudut pandang pekerja maupun pemberi kerja, kejelasan mengenai sistem pengupahan adalah fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam dunia kerja.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan suatu wilayah atau negara

dalam menyediakan akses terhadap kebutuhan dasararganya. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari beberapa aspek utama seperti kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Melalui indeks ini, dapat dilihat bagaimana pembangunan yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam menghitung IPM, sejumlah indikator pokok digunakan sebagai dasar. Misalnya, harapan hidup menjadi gambaran kondisi kesehatan masyarakat, sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf mencerminkan kualitas serta keterjangkauan pendidikan. Selain itu, tingkat pendapatan riil per kapita juga menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka (Putra, 2018). Ketiga aspek tersebut menyatu menjadi satu nilai indeks yang menggambarkan capaian pembangunan manusia secara menyeluruh di suatu wilayah. Pentingnya IPM tidak hanya sebagai statistik semata, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perencanaan pembangunan manusia secara lebih terarah dan adil.

Seperti dijelaskan oleh Latifah et al. (2017), tujuan IPM adalah untuk menciptakan ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Indikator-indikator yang digunakan dalam IPM dipilih secara cermat agar bisa mencerminkan kondisi riil masyarakat. Gabungan indikator-indikator tersebut disusun menjadi satu indeks terpadu sehingga mudah digunakan oleh pembuat kebijakan maupun lembaga evaluasi pembangunan.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Empat indikator utama yang digunakan untuk menyusun IPM adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama pendidikan, serta daya beli masyarakat. Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah maupun nasional dapat mengetahui apakah intervensi pembangunan telah membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Marhaeni et al. (2008) menyatakan bahwa IPM dapat dijadikan sebagai cermin untuk menilai seberapa tinggi kesejahteraan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat. Nilai IPM yang meningkat menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Bahkan, peningkatan IPM, terutama pada aspek pendidikan, diyakini mampu mendorong terciptanya generasi yang lebih cerdas dan kompetitif, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kerja dan produktivitas masyarakat.

Dalam sudut pandang lain, Chairunnas (2018) menegaskan bahwa IPM terdiri dari tiga unsur utama yang mewakili dimensi penting dalam pembangunan manusia. Unsur pertama adalah usia harapan hidup yang menggambarkan kualitas layanan kesehatan. Unsur kedua adalah pengetahuan, yang diukur dari kombinasi antara rata-rata lama sekolah dan tingkat

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian berperan sebagai representasi abstrak yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang menjadi fokus kajian. Dengan menyusun kerangka ini, peneliti dapat memvisualisasikan bagaimana suatu masalah dianalisis berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor yang diyakini memiliki pengaruh terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari sejumlah variabel yang diduga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan, sebagaimana telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian sebelumnya.

Langkah ini penting karena kerangka berpikir bukan hanya menyusun arah penelitian secara sistematis, tetapi juga memberikan gambaran teoretis mengenai bagaimana berbagai unsur dalam penelitian saling berinteraksi. Peneliti berupaya menelusuri alur sebab-akibat melalui pendekatan logis berdasarkan teori yang relevan, guna memahami lebih dalam bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan yang sedang dikaji.

Menurut pendapat para ahli, penyusunan kerangka konseptual memiliki peran strategis dalam menjembatani antara teori dan praktik empiris di lapangan (Latief, 2016). Artinya, melalui kerangka berpikir, peneliti tidak hanya menjelaskan konsep-konsep yang digunakan,

tetapi juga menegaskan posisi masing-masing variabel dalam peta hubungan yang logis. Hal ini akan sangat membantu pembaca, penguji, atau peneliti lain dalam memahami konteks masalah yang diteliti, termasuk arah analisis dan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Dengan demikian, keberadaan kerangka berpikir bukan sekadar pelengkap dalam penyusunan laporan ilmiah, melainkan sebagai pondasi intelektual yang menopang keseluruhan proses penelitian. Kerangka tersebut menjadi alat bantu yang sangat penting untuk menguraikan dan menelusuri berbagai isu yang ingin diselidiki secara mendalam. Maka, dalam merancang penelitian yang komprehensif dan terarah, kejelasan kerangka berpikir menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan.

Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang bersifat sementara dan dirumuskan sebagai langkah awal dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah peneliti mengidentifikasi pokok persoalan dan merumuskan dugaan teoretis, hipotesis ini disusun untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Menurut Sugiyono (2017), hipotesis tidak lain adalah pernyataan yang masih perlu dibuktikan, sehingga penelitian bertujuan untuk menemukan data yang dapat memperkuat atau menolak dugaan tersebut. 1. Variabel dependen (tingkat pengangguran) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (upah). 2. Variabel dependen (tingkat pengangguran) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (IPM). 3. Variabel dependen (tingkat pengangguran) memiliki hubungan yang substansial dengan variabel independen (upah) dan IPM.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data berbasis angka sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan hubungan antar variabel. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengubah informasi yang diperoleh di lapangan menjadi bentuk numerik yang selanjutnya dapat dianalisis dengan teknik statistik guna mendapatkan kesimpulan yang objektif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, sedangkan data pendukung dikumpulkan dari sumber lain yang relevan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi sebagai sarana dalam menggali informasi yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa. penelitian ini di laksanakan antara bulan Agustus 2022 hingga November 2022.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana faktor-faktor tertentu memberikan pengaruh terhadap kondisi pengangguran di wilayah Kabupaten Minahasa. Dalam studi ini, dua aspek utama dijadikan sebagai variabel bebas, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat upah yang berlaku. Keduanya dianalisis untuk melihat bagaimana keterkaitannya terhadap tingkat pengangguran, yang berperan sebagai variabel terikat dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan kuantitatif antar variabel guna mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena pengangguran di daerah tersebut.

Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel upah memberikan pengaruh negatif yang sangat kecil terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil regresi, koefisien variabel upah tercatat sebesar $-1,749E-06$, dengan nilai statistik t sebesar 1,039 dan nilai signifikansi (p -value) sebesar 0,339. Artinya, setiap kenaikan upah sebesar satu satuan hanya berpotensi menurunkan tingkat pengangguran sekitar 0,0001749 persen. Namun, pengaruh ini tidak terbukti signifikan pada tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan upah tidak memberikan efek yang nyata terhadap penurunan pengangguran dalam konteks penelitian ini.

Temuan ini sesuai dengan hasil beberapa studi sebelumnya. Mukaromah et al. (2022) menyatakan bahwa upah minimum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang secara implisit mengindikasikan bahwa peningkatan upah tidak otomatis berujung pada pengurangan angka pengangguran. Penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal UIN Alauddin Makassar (2023) juga menemukan bahwa upah minimum tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kalangan usia muda di Indonesia, yang mendukung temuan bahwa kenaikan upah belum tentu berdampak besar dalam mengatasi pengangguran. Selain itu, Jurnal Lembaga Kita (2023) melaporkan bahwa meskipun upah minimum berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran, hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan tersebut namun tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran

Analisis regresi yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Koefisien regresi untuk IPM tercatat sebesar -0,131, dengan nilai t-hitung -0,233 dan nilai p sebesar 0,823. Ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM sebesar satu satuan diperkirakan dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,131 persen, namun perubahan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian lain. Mukaromah et al. (2022) mengemukakan bahwa IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang juga berarti bahwa kenaikan IPM tidak selalu berkorelasi dengan penurunan langsung tingkat pengangguran. Studi dari Jurnal UIN Alauddin Makassar (2023) mendukung temuan ini dengan hasil yang serupa, yaitu pengaruh IPM terhadap pengangguran bersifat negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal Universitas Bung Hatta (2023) juga menegaskan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di kalangan pemuda Indonesia, semakin memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara IPM dan pengangguran tidak selalu kuat atau langsung.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai variabel yang diduga memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pendapatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa upah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Upah yang rendah tidak selalu menjadi pemicu meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Di sisi lain, biaya tenaga kerja yang lebih rendah justru bisa membuat perusahaan enggan menambah jumlah karyawan karena mereka lebih memilih efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa peran upah dalam mempengaruhi pengangguran bersifat kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek-aspek penting seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, juga ditemukan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran dalam penelitian ini. Wilayah yang memiliki IPM rendah biasanya berhadapan dengan angka pengangguran yang tinggi karena penduduknya cenderung memiliki keterampilan dan kualifikasi yang kurang memadai untuk mengisi berbagai lapangan pekerjaan (Latumaerissa, 2015). Dengan kata lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam mengurangi angka pengangguran.

Hubungan Upah dan IPM terhadap Pengangguran Secara keseluruhan, baik upah maupun IPM menunjukkan hubungan yang cukup erat dengan tingkat pengangguran. Khususnya, kenaikan upah minimum tanpa disertai Kesimpulan peningkatan produktivitas

perusahaan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran karena perusahaan akan menahan jumlah pekerja untuk mengendalikan biaya produksi. Sebaliknya, IPM yang tinggi, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, umumnya dapat menekan angka pengangguran melalui peningkatan kemampuan dan kesiapan tenaga kerja (BPS, 2019).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian maupun kebijakan ke depan antara lain:

Pendalaman Analisis Pengaruh Upah dan IPM terhadap Pengangguran Diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam untuk menggali secara detail mekanisme bagaimana upah dan IPM memengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. Analisis yang lebih komprehensif akan membantu memahami faktor-faktor yang mungkin belum tergal dalam penelitian ini.

Pengembangan Kebijakan Pengurangan Pengangguran. Berdasarkan hasil kajian, perlu adanya kebijakan yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kebijakan terkait upah harus dirancang agar dapat menciptakan insentif yang seimbang antara pekerja dan perusahaan, sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penggunaan Data Terbaru dan Akurat. Agar penelitian dan kebijakan yang dirancang dapat relevan dan efektif, sangat disarankan untuk menggunakan data yang paling mutakhir dan valid. Data terbaru akan membantu menangkap dinamika kondisi ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung serta menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Aisyah, & Prawoto, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 1-7.
- Pertiwi, A., & Novianti, W. (2018). *Pengaruh biaya produksi dan modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016*.
- Anggraini, Y. (2018). *Kebijakan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia*. Jakarta: INDOCAMP.
- Bagus, Y. S. O., Anak Agung, & Widanta, P. (n.d.). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.
- Bastian, I. (2016). *Strategi manajemen sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). BPS: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Tana Toraja dalam angka tahun 2023*.
- Cahyani, G. F. (2016). Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 5(3), 1-15.
- Chairunnas. (2018). Pengaruh penduduk usia produktif, zakat, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Damanhuri, D. S., & Muhammad, F. (2014). *Masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia*. Bogor: IPM.
- Diniyah, H., & Perдини Fisabilillah, L. W. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 155-168.
- Firdhania, R., & Muslihatinningsih, F. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 117-121.
- Fitri, & Junaidi. (2016). *Pengaruh pendidikan, upah, dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran*.

- Ghozali, I. (2014). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (6th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halirafi, C., Anwar, K., & Abdy Yusuf, M. (2020). Pengaruh angka harapan hidup (AHH) dan konsumsi per kapita terhadap pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Haryanti, A. S. (2018). Penggunaan media gambar dan media radio pada pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X SMA Tunas Harapan Balarajatanggerang. *Jurnal Kredo*, 1(2), 14-25.
- Hilmi, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2).
- Khatimah, H. (2018). Posisi dan peran media dalam kehidupan masyarakat. *Tasamuh*, 16(1), 119–138.
- Kuncoro, H. (2022). Upah sistem bagi hasil dan penyerapan tenaga kerja. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1).
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. (2019). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 162–172.
- Latifah Husain, S.Pd. (2017). *Profesi keguruan menjadi guru profesional*. Pustaka Baru Press.
- Latifah, L., et al. (2017). *Efektivitas self management module dalam mengatasi morning sickness*.
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Medika.
- Mangirang, G. S., Masinambow, V. A. J., & Masloman, I. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 13-24.
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori makro ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marhaeni, et al. (2008). *Indeks pembangunan manusia tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sunarni. (2017). Pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan manusia Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal*.
- Marliana, L. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87-91.
- Martono, R. V. (2019). *Analisis produktivitas dan efisiensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latifah, N., Rotinsulu, D. C. H., & T., R. L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Kota Manado. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 17.
- Niswan, E., Rawa, R. D., & D. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang. *Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti*, 7(2).
- Nurdiana, H. M., Arisah, N., Riesso, A. S., & Hasanah, D. F. (2020). *An analysis of the effect of economic growth, inflation, and open unemployment on poverty in South Sulawesi Province*. *Quest Journal: Journal of Research in Business and Management*, 8(9), 14–17.
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP, dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113-1132.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia: tinjauan historis, teoritis, dan empiris*. Graha Ilmu.

- Putri, et al. (2019). *Laporan hasil pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di SDN 12 Sesetan, Denpasar Selatan tahun 2019*. Laporan Pelayanan Asuhan: Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Rabbani, A. S., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2017–2021. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4537-4543.
- Sukirno, S. (2016). *Makro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap opini going concern. *Vol. 1, Hal. 2, ISSN: 0189-8939*.
- Sholeh, M. (2007). Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah: Teori serta beberapa potret di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1).
- Wardiansyah, et al. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran: Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, 5(1), 2303-1220.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176.